



**PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA**

**INTEGRASI ASURANSI PERTANIAN  
DENGAN PERKEBUNAN INTI RAKYAT  
UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP PETANI KEBUN**

**BIDANG KEGIATAN:**

**PKM-GT**

**Diusulkan Oleh:**

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Junasa Andhika Imanuddin</b> | <b>(H43070126 / 2007)</b> |
| <b>2. Hata Madia Kusumah</b>       | <b>(H34070001 / 2007)</b> |
| <b>3. Atika Sisilia</b>            | <b>(H34062599 / 2006)</b> |

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BOGOR**

**2009**

## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Integrasi Asuransi Pertanian dengan Perkebunan Inti Rakyat untuk Meningkatkan Taraf Hidup Petani Kebun
2. Bidang Kegiatan : ( ) PKM-AI ( ☒ ) PKM-GT
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
  - a. Nama Lengkap : Junasa Andhika Imanuddin
  - b. NIM : H34070126
  - c. Jurusan : Agribisnis
  - d. Universitas/Institut/Politeknik : Institut Pertanian Bogor

Menyetujui  
Ketua Jurusan

(Dr.Ir. Nunung Kusnadi, MS)  
NIP. 1314151082

Wakil Rektor Bidang Akademik  
Dan Kemahasiswaan

(Prof. Dr. Ir. Yonnny Koesmaryono)  
NIP. 131473999

Bogor, 7 April 2009

Ketua Pelaksana Kegiatan

(Junasa Andhika Imanuddin)  
NIM. H34070126

Dosen Pendamping

(Dra. Yusalina, MSi)  
NIP.131914523

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji marilah kita persembahkan kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kelompok kami dapat menyelesaikan Program Kreativitas Mahasiswa – Gagasan Tertulis ini yang berjudul ”Integrasi Asuransi Pertanian dengan Perkebunan Inti Rakyat untuk Meningkatkan Taraf Hidup Petani Kebun.” Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita semua adalah umatnya.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan PKM-GT ini. Kami menyadari tanpa bantuan mereka maka kami tidak akan dapat menyelesaikan PKM-GT ini karena pada dasarnya semua manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya.

Kami juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan PKM-GT ini sehingga kritik, saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan kualitas penulisan kedepannya.

Bogor, 6 April 2009

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Lembar Pengesahan.....                | i   |
| Kata Pengantar.....                   | ii  |
| Daftar Isi.....                       | iii |
| Daftar Tabel.....                     | iv  |
| Ringkasan.....                        | v   |
| <br>                                  |     |
| Pendahuluan.....                      | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....               | 1   |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....         | 2   |
| 1.3 Tujuan Penulisan.....             | 3   |
| 1.4 Manfaat Penulisan.....            | 3   |
| <br>                                  |     |
| Telaah Pustaka.....                   | 4   |
| 2.1 Perkebunan.....                   | 4   |
| 2.2 Perkebunan Inti Rakyat (PIR)..... | 5   |
| 2.3 Asuransi.....                     | 9   |
| 2.4 Asuransi Pertanian.....           | 10  |
| <br>                                  |     |
| Metode Penulisan.....                 | 10  |
| 3.1 Metode Perolehan Data.....        | 10  |
| 3.2 Metode Pengolahan Data.....       | 11  |
| 3.3 Metode Penulisan.....             | 11  |
| <br>                                  |     |
| Analisis dan Sintesis.....            | 11  |
| 4.1 Analisis.....                     | 11  |
| 4.2 Sintesis.....                     | 13  |
| <br>                                  |     |
| Kesimpulan dan Saran.....             | 14  |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan.....           | 14 |
| 5.2 Saran.....                | 14 |
| Daftar Pustaka.....           | 16 |
| Biodata Dosen Pembimbing..... | 17 |
| Biodata Ketua Kelompok.....   | 18 |
| Biodata Anggota Kelompok..... | 19 |

## **DAFTAR TABEL**

|  |   |
|--|---|
| Tabel 1. Realisasi Pembangunan Kebun Plasma dan Penempatan<br>Transmigrasi Pola PIR Transmigrasi sampai dengan Maret 1997..... | 7 |
| Tabel 2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk<br>Miskin Menurut Daerah, Februari 2005 – Maret 2006.....            | 9 |

## RINGKASAN

Kepadatan penduduk menjadi masalah utama diadakannya program transmigrasi sehingga memicu pemerintah untuk mengintegrasikannya ke dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau yang lebih dikenal PIR-Trans dalam hal ini. Pola ini merupakan pola yang ideal dan dapat memecahkan berbagai masalah mulai dari pemerataan penduduk hingga kemiskinan petani.

Namun, kenyataannya sebagian besar rakyat miskin di Indonesia adalah dari golongan petani. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program pertanian yang dibuat oleh pemerintah untuk pembangunan ini masih belum sepenuhnya berhasil. Dalam perkebunan, pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sudah cukup baik, tetapi pengaplikasiannya yang sulit. Ada banyak kendala yang berada dalam rantainya. Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru untuk memecah mata rantai tersebut dan mengembalikan pada sistem yang ada yaitu Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang memang pada dasarnya merupakan suatu konsep yang sangat ideal seperti telah disebutkan diatas.

Harus ada pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kejatuhan harga ataupun kegagalan panen dalam hal ini yang paling tepat adalah perusahaan asuransi. Memang resiko sektor pertanian sangat besar bahkan lebih besar daripada sektor industri karena berbasis sumber daya yang masih sangat mengandalkan alam. Sehingga solusinya adalah pembagian resiko dengan pihak perusahaan inti yang menjadi 'bapak angkat' dari para petani kebun. Dalam hal ini, pihak perusahaan asuransi adalah penanggung jawab langsung atas resiko namun secara tidak langsung pihak inti bertanggung jawab atas minimalisir terjadinya resiko tersebut dengan pengadaan saprodi yang berkualitas, seperti bibit unggul, peralatan budidaya canggih, dan sistem pemantauan yang akurat, juga pembinaan yang memadai bagi para petani kebun dan diawasi kualitasnya oleh perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan inti mau tidak mau harus memberikan yang terbaik bagi para petani kebun dan pihak asuransi pun menjadi lebih 'aman' karena resikonya dapat diminimalisir. Efeknya, hasil budidaya akan melimpah dan para petani akan menjualnya kepada perusahaan inti karena sudah adanya kedekatan yang intens antara inti dengan plasma selama masa budidaya yang diawasi kualitasnya oleh pihak asuransi dan pemerintah. Petani pun akan merasa aman dari adanya resiko gagal panen karena sudah adanya jaminan dari perusahaan asuransi.

Menurut Syamsuddin dkk (1985), Perusahaan Inti Rakyat (PIR) adalah suatu pola untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi petani peserta dan didukung oleh suatu sistim (sistem, *pen*) pengelolaan usaha dengan memajukan berbagai kegiatan produksi dengan

pengolahan dan pemasaran dengan menggunakan perusahaan sebagai inti dalam suatu sistem (sistem, *pen*) kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. Dari sini, dapat ditarik bahwa konsep dasar dari pola PIR adalah kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.

Dalam telaah pustaka, didapat bahwa tujuan sebenarnya dari adanya pola PIR ini adalah untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi petani peserta yang dalam hal ini plasma dan didukung oleh perusahaan inti. Diharapkan juga yang terjadi adalah kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. Ini merupakan suatu konsep ideal untuk meningkatkan taraf hidup petani kebun. Selain itu, nantinya para petani plasma tersebut juga akan mendapatkan lahan sendiri sebesar 80 persen lahan budidaya PIR-nya setelah kredit selesai. Tujuan ini tak lain adalah agar para petani dapat mandiri dan tidak terus diurus oleh perusahaan inti. Sebelumnya, para petani mendapat pembinaan dari perusahaan inti yang akan menunjang kemampuan budidaya dan manajerial perkebunannya.

Adanya asuransi pertanian sangat penting bagi para petani, terutama petani yang tergabung dalam pola PIR karena dapat menjamin kegagalan panen saat petani sudah dibebani oleh pembayaran kredit yang tinggi. Pihak asuransi hanya tinggal menjamin dari setiap hasil perkebunan dari komoditi yang diusahakan oleh petani plasma dengan premi dibayar dicicil setiap waktu panen yang berhasil. Dalam hal ini, terjadi pembagian resiko yaitu, resiko secara langsung jika gagal panen yang ditanggung asuransi pertanian dan resiko tidak langsung jika gagal panen yaitu meminimalisir terjadinya gagal panen seperti peningkatan kualitas pembinaan dan sarana produksi yang ditanggung oleh perusahaan inti. Ketiga pihak akan merasakan dampak positif. Pihak asuransi dapat mengembangkan bisnis asuransi di bidang perkebunan dengan baik dan prospeknya cerah. Pihak petani plasma akan merasa aman karena pembinaan dan penyediaan sarana produksi yang maksimal. Pihak perusahaan inti akan berkembang karena produktivitas petani meningkat dan sudah pasti akan dijual kepada pihak perusahaan inti karena pembinaan yang baik dan kedekatan yang intens dengan petugas lapang.

Dengan adanya integrasi asuransi pertanian ini pula ke dalam pola PIR dapat meningkatkan taraf hidupnya karena pembinaan dan penyediaan sarana produksi akan optimal dan produktivitas petani meningkat sehingga pendapatan petani bertambah dan meningkat taraf hidupnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka seperti literatur, sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, dan data dari internet. Kemudian data-data maupun kutipan-kutipan yang terdapat di dalam sumber pustaka dihubungkan dengan bagian-bagian tulisan ini yang tentunya relevan untuk dimasukkan.



## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan penduduk di Indonesia sejak era penjajahan Belanda tidak merata di seluruh daerah di Indonesia. Kebanyakan penduduk Indonesia, bahkan hingga saat ini terkonsentrasi di pulau Jawa. Hal ini memberikan efek *multiplier* yang sangat banyak sekali mulai dari penyempitan lahan pertanian yang tergerus pemukiman, kesenjangan sosial yang semakin parah, hingga kemiskinan yang melanda sebagian besar penduduk.

Kepadatan penduduk, penyempitan pemilikan lahan pertanian, dan kemiskinan yang mulai dirasakan melanda pulau Jawa sudah menjadi beban pemikiran sejak pemerintahan Belanda awal abad ke-20 (1905) (Ahmad, 1998). Hal ini mendorong pemerintah mencari alternatif penyelesaian masalah tersebut, salah satunya dengan program transmigrasi.

Di sisi lain, pemerintah mulai menggeser pola pembangunan dari yang bersifat tertutup kepada yang lebih terbuka dengan lebih mendekatkan hubungan antara perusahaan besar dengan unit-unit usaha kecil yang berhubungan agar terjadi proses transfer informasi pengetahuan dan manajemen. Di bidang pertanian, pola ini dikenal dengan nama Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yang dimulai dari bidang perkebunan (1977), kemudian disusul bidang peternakan, perikanan, bahkan kehutanan (Ahmad, 1998). Di bidang perkebunan dimulai dari Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan Perusahaan Rakyat Inti Perkebunan (PIR-Perkebunan) (Ahmad, 1998).

Selain itu, perkembangan PIR-Perkebunan ini juga mencakup komoditi unggulan, seperti karet. Satu hal yang perlu diketahui, pola PIR ini merupakan

pengembangan dari proyek yang diinisiasi oleh Bank Dunia yang disebut *Nuclear Estate Smallholder (NES)*.

Pada tahun 1986 pemerintah mengintegrasikan program transmigrasi dengan PIR-Perkebunan menjadi Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans). Namun, realisasinya baru dimulai pada tahun 1987/1988 (Ahmad, 1998).

Harus ada pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan panen dalam hal ini yang paling tepat adalah perusahaan asuransi. Memang resiko sektor pertanian sangat besar bahkan lebih besar daripada sektor industri karena berbasis sumber daya yang masih sangat mengandalkan alam. Sehingga solusinya adalah pembagian resiko dengan pihak perusahaan inti yang menjadi ‘bapak angkat’ dari para petani kebun. Dalam hal ini, pihak perusahaan asuransi adalah penanggung jawab langsung atas resiko namun secara tidak langsung pihak inti bertanggung jawab atas minimalisir terjadinya resiko tersebut dengan pengadaan saprodi yang berkualitas, seperti bibit unggul, peralatan budidaya canggih, dan sistem pemantauan yang akurat, juga pembinaan yang memadai bagi para petani kebun dan diawasi kualitasnya oleh perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan inti mau tidak mau harus memberikan yang terbaik bagi para petani kebun dan pihak asuransi pun menjadi lebih ‘aman’ karena resikonya dapat diminimalisir. Efeknya, hasil budidaya akan melimpah dan para petani akan menjualnya kepada perusahaan inti karena sudah adanya kedekatan yang intens antara inti dengan plasma selama masa budidaya yang diawasi kualitasnya oleh pihak asuransi dan pemerintah. Petani pun akan merasa aman dari adanya resiko gagal panen atau anjloknya harga karena sudah adanya jaminan dari perusahaan asuransi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam realitasnya, pola PIR menghadapi berbagai kendala yang membuat pelaksanaan pola PIR yang sudah cukup baik di tataran konsepsi menjadi buruk dalam realitasnya.

Ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pola PIR dan yang paling utama adalah kegagalan panen. Namun, ada masalah lain yang bukan disebabkan oleh alam. *Pertama*, kurang optimalnya petugas lapangan (UPT) yang membina petani plasma secara langsung kurang maksimal, bahkan di beberapa daerah tidak ada petugas UPT. Dalam hal PIR karet, konversi belum terjadi ketua UPT-nya telah pergi (Ahmad, 1998). Para petani plasma tidak terbina dan cenderung liar semaunya, pupuk tidak ditabur malah dijual, hasil panen dijual ke luar, pencurian getah merajalela, dan sebagainya (Ahmad, 1998). *Kedua*, petani plasma mengalami kemiskinan karena sama sekali tidak ada jaminan hidup dan pihak inti membebaskan biaya pengolahan karet kepada petani peserta sebesar 30 persen setiap nilai setoran karet. Pemotongan 30 persen tersebut dihitung sebelum dipotong cicilan kredit 25 persen, sehingga jumlah potongan menjadi sekitar 55 persen (Ahmad, 1998). Dampaknya, para petani lebih memilih menjual getah karetnya kepada tengkulak untuk menghindari pemotongan dan memang dari tengkulak menawarkan harga yang lebih tinggi. *Ketiga*, kualitas latex yang rendah.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penulisan karya tulis gagasan ilmiah ini antara lain :

1. Memberikan salah satu solusi atas kegagalan penerapan asuransi pertanian di Indonesia dengan adanya integrasi ke dalam pola Perkebunan Inti Rakyat.
2. Menjelaskan konsep asuransi pertanian yang diaplikasikan pada pola Perkebunan Inti Rakyat sehingga petani kebun dapat meningkat taraf hidupnya.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Karya tulis ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulisan karya tulis ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengasah kemampuan menulis karya tulis ilmiah, mengkritisi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan berusaha menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

2. Bagi Petani Plasma

Petani Plasma menjadi lebih siap dalam menghadapi penerapan asuransi pertanian ke dalam pola Perkebunan Inti Rakyat yang mereka berada didalamnya.

3. Bagi Perusahaan Inti

Perusahaan Inti dapat memahami dan menyusun strategi agar kerjasama dengan Petani Plasma dapat terjalin dengan baik dan saling menguntungkan sesuai dengan pola Perkebunan Inti Rakyat.

4. Bagi Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi dapat lebih mengembangkan strateginya dalam hal asuransi pertanian.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **2.1 Perkebunan**

Perkebunan merupakan salah satu subsektor dari pertanian. Komoditi perkebunan Indonesia antara lain kelapa sawit, karet, kelapa, teh, dan kakao. Sistem perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

Menurut Mubyarto dkk (1992), sistem perkebunan besar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. merupakan bentuk usaha pertanian berskala besar dan kompleks;

2. menggunakan areal pertanahan luas;
3. bersifat padat modal;
4. menggunakan tenaga kerja yang cukup besar, dengan pembagian kerja yang rinci dan struktur hubungan kerja yang rapi;
5. menggunakan teknologi modern; dan
6. berorientasi pada pasar.

Hal ini berbeda sekali dengan apa yang selama ini dikenal oleh rakyat dengan usaha kebunnya (perkebunan rakyat) dengan ciri usaha sebagai berikut:

1. bentuk usahanya kecil,
2. penggunaan lahan terbatas,
3. tidak padat modal,
4. sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, dan
5. lebih berorientasi pada kebutuhan subsistensi.

Perkebunan sering disebut “pabrik” pertanian karena proses memproduksi hasilnya berupa *output* komoditi perkebunan adalah melalui proses memadukan aneka faktor produksi (input) “modern” (tanah, tenaga kerja, dan modal serta manajemen) laksana sebuah pabrik saja (Mubyarto dkk, 1992).

## **2.2 Perkebunan Inti Rakyat (PIR)**

Dalam buku Repelita-II yang dimaksud dengan PIR adalah Perkebunan Inti Rakyat. Karena polanya diterapkembangkan di luar usaha perkebunan, maka pengertian PIR berubah menjadi Perusahaan Inti Rakyat yang juga sering disebut kemitraan inti plasma. (Ahmad, 1998).

Menurut Syamsuddin dkk (1985), Perusahaan Inti Rakyat (PIR) adalah suatu pola untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi petani peserta dan didukung oleh suatu sistim (sistem,

*pen*) pengelolaan usaha dengan memajukan berbagai kegiatan produksi dengan pengolahan dan pemasaran dengan menggunakan perusahaan sebagai inti dalam suatu sistim (sistem, *pen*) kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. Dari sini, dapat ditarik bahwa konsep dasar dari pola PIR adalah kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.

Pola PIR ini merupakan pola hubungan timbal balik antara petani plasma sebagai pengelola lahan dan perusahaan inti sebagai penanggung jawab kredit sementara, pelaksana pembinaan petani plasma, dan penampung hasil panen. Petani peserta (plasma) berasal dari daerah PIR tersebut dan juga para transmigran. Petani diberikan lahan yang akan mereka budidayakan komoditas tertentu dengan biaya produksi berasal dari kredit yang ditanggung sementara oleh perusahaan inti. Selanjutnya, hasil panen harus dijual kepada perusahaan inti dengan pembebanan biaya pengolahan kepada petani plasma.

Masa pembinaan petani peserta dibagi menjadi dua fase, *pertama*, fase prakonversi, pada saat tanaman perkebunan belum menghasilkan dan kebun plasma belum dibagikan, pada masa ini kredit masih ditangani pihak inti. Pada fase ini, pembinaan teknik perkebunan dilaksanakan oleh pihak inti dengan jasa manajemen 10 persen. *Kedua*, fase konversi (pascakonversi) pada saat kebun telah dibagikan kepada petani plasma (transmigran), tanggung jawab kredit telah dialihkan kepada transmigran, dan tanaman sudah dapat dipanen dan selang waktu kira-kira setahun para petani peserta harus sudah mulai mengangsur kreditnya kepada bank yang sudah ditunjuk, melalui kebun inti dengan jasa 0,25 persen (Ahmad, 1998).

Dalam perusahaan inti rakyat perkebunan untuk menciptakan saling ketergantungan, sebagai pengikat dari suatu sistem kerja sama yang saling memerlukan, maka ditetapkan bahwa 20 persen dari luas usaha merupakan milik inti dan 80 persen harus dibagikan menjadi milik petani plasma (Ahmad, 1998).

Tentunya setelah petani mulai mengangsur kreditnya sendiri, yaitu pada saat tanaman perkebunan sudah dapat dipanen.

Pada tahun 1986 pemerintah mengintegrasikan program transmigrasi dengan PIR-Perkebunan menjadi Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans). Namun, realisasinya baru dimulai pada tahun 1987/1988 (Ahmad, 1998). Hingga bulan Maret 1997, realisasi PIR-Trans ini terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. Realisasi Pembangunan Kebun Plasma dan Penempatan Transmigrasi Pola PIR Transmigrasi sampai dengan Maret 1997

| Propinsi           | Realisasi Luas Kebun Plasma (Ha) | Penempatan |           |
|--------------------|----------------------------------|------------|-----------|
|                    |                                  | KK         | Jiwa      |
| DI. Aceh           | 2.000                            | 100        | 104,2     |
| Sumatera Utara     | 9.515                            | 6.003      | 25.212,6  |
| Sumatera Barat     | 6.000                            | 5.050      | 21.210,0  |
| Riau               | 128.689                          | 44.140     | 185.388,0 |
| Jambi              | 78.750                           | 21.901     | 91.984,2  |
| Bengkulu           | 0                                | 0          | 0,0       |
| Sumatera Selatan   | 57.563                           | 24.360     | 102.312,0 |
| Kalimantan Barat   | 113.992                          | 29.985     | 125.937,0 |
| Kalimantan Tengah  | 5.439                            | 11.977     | 50.303,4  |
| Kalimantan Selatan | 0                                | 0          | 0,0       |
| Kalimantan Timur   | 1.500                            | 0          | 0,0       |
| Sulawesi Tengah    | 7.005                            | 100        | 104,2     |
| Sulawesi Tenggara  | 1.077                            | 5.226      | 21.949,2  |
| Sulawesi Selatan   | 15.070                           | 3.133      | 13.158,6  |
| Irian Jaya         | 0                                | 0          | 0,0       |
| Jumlah             | 426.600                          | 151.975    | 637.663,4 |

Sumber: (Ahmad, 1998)

Ada beberapa hal yang melatar belakangi dilahirkan dan dikembangkannya pola PIR ini antara lain adanya permasalahan kemiskinan yang masih membelenggu para petani perkebunan rakyat (mandiri) walaupun persentase besaran lahannya terus berkembang sejak Repelita seiring dengan menyusutnya perkebunan besar baik milik negara maupun swasta. Kebanyakan pekebun kecil secara akumulatif memiliki 6 miskin yakni miskin asset, miskin uang/modal, miskin IPTEK, miskin akses, dan miskin motif ekonomi (Ahmad, 1998). Kesemuanya itu, dengan adanya pembentukan pola PIR yang merupakan kemitraan inti-plasma dimana perusahaan perkebunan sebagai inti dan petani kebun sebagai plasma dianggap mampu untuk menghilangkan kemiskinan diatas.

Namun dari semua itu, kenyataannya sebagian besar rakyat miskin di Indonesia adalah dari golongan petani.

BPS menyebutkan bahwa pada tahun 1999 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 47,97 juta jiwa dan turun pada tahun 2003 menjadi 35,68 juta jiwa. Dari jumlah 35,68 juta jiwa itu, 22,69 juta orang berada di pedesaan. Karena sebagian besar warga pedesaan bermata pencaharian sebagai petani, maka artinya sebagian besar masyarakat miskin negeri ini adalah mereka yang status mata pencahariannya bertani atau disebut dengan petani. Data pada 2001 mengungkapkan 55% dari penduduk miskin di Indonesia adalah petani. ([www.pertaniansehat.or.id](http://www.pertaniansehat.or.id)).

Hal diatas mengindikasikan bahwa program-program pertanian yang dibuat oleh pemerintah untuk pembangunan ini masih belum sepenuhnya berhasil. Dalam perkebunan, pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sudah cukup baik, tetapi pengaplikasiannya yang sulit. Ada banyak kendala yang berada dalam rantainya. Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru untuk memecah mata rantai tersebut dan mengembalikan pada sistem yang ada yaitu Perkebunan Inti Rakyat



(PIR) yang memang pada dasarnya merupakan suatu konsep yang sangat ideal seperti telah disebutkan diatas.

Tabel 2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Februari 2005 – Maret 2006

| Daerah/Tahun            | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) |               |         | Jumlah penduduk miskin (juta) | Persentase penduduk miskin |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
|                         | Makanan                          | Bukan Makanan | Total   |                               |                            |
| <b><i>Perkotaan</i></b> |                                  |               |         |                               |                            |
| Februari 2005           | 103 992                          | 46 807        | 150 799 | 12,40                         | 11,37                      |
| Maret 2006              | 126 527                          | 48 797        | 175 324 | 14,29                         | 13,36                      |
| <b><i>Perdesaan</i></b> |                                  |               |         |                               |                            |
| Februari 2005           | 84 014                           | 33 245        | 117 259 | 22,70                         | 19,51                      |
| Maret 2006              | 103 180                          | 28 076        | 131 256 | 24,76                         | 21,90                      |
| <b><i>Kota+Desa</i></b> |                                  |               |         |                               |                            |
| Februari 2005           | 91 072                           | 38 036        | 129 108 | 35,10                         | 15,97                      |
| Maret 2006              | 114 619                          | 38 228        | 152 847 | 39,05                         | 17,75                      |

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

### 2.3 Asuransi

Di dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”(Prakoso, 2004).

Ada 2 pihak terlibat di dalam Asuransi, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula

belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya (Prakoso, 2004).

Kitab Undang-undang Hukum Dagang di dalam Pasal 247 menyebutkan tentang 5 (lima) macam asuransi, ialah:

1. Asuransi terhadap kebakaran
  2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
  3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa)
  4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
  5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai
- (Prakoso, 2004).

## **2.4 Asuransi Pertanian**

Dalam hal asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian tidak semua kerugian ditanggung oleh pihak asuransi. Sehubungan dengan adanya keadaan istimewa, maka Pasal 301 menjelaskan, bahwa kerugian yang wajib dikembalikan oleh asurador, adalah merupakan selisih antara hasil pertanian pada saat akan dipanen (inoogsting) dan harga hasil pertanian di satu pihak, dengan sesudah terjadinya kegagalan di lain pihak (Prakoso, 2004). Jadi yang ditanggung hanya selisih hasil dari adanya kegagalan panen.

## **METODE PENULISAN**

### **3.1 Metode Perolehan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka seperti literatur, sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, dan data dari internet. Kemudian data-data

maupun kutipan-kutipan yang terdapat di dalam sumber pustaka dihubungkan dengan bagian-bagian tulisan ini yang tentunya relevan untuk dimasukkan.

### **3.2 Metode Pengolahan Data**

Penulisan ini juga mengalami pengolahan data. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul selanjutnya mengalaminya pengeditan, pengolahan, dan penyusunan yang selanjutnya siap untuk dianalisis. Selain itu, ada juga data tabel yang langsung dikopi dari file aslinya sehingga memudahkan penulisan.

### **3.3 Metode Penulisan**

Penulisan dilakukan dengan mengurutkan urutan sistematis mulai dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan; telaah pustaka; metode penulisan; analisis dan sintesis; dan kesimpulan. Selanjutnya melengkapi tulisan dengan halaman muka, lembar pengesahan, kata pengantar, dan biodata penulis.

## **ANALISIS DAN SINTESIS**

### **4.1 Analisis**

Dalam telaah pustaka, didapat bahwa tujuan sebenarnya dari adanya pola PIR ini adalah untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi petani peserta yang dalam hal ini plasma dan didukung oleh perusahaan inti. Diharapkan juga yang terjadi adalah kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. Ini merupakan suatu konsep ideal untuk meningkatkan taraf hidup petani kebun. Selain itu, nantinya para petani plasma tersebut juga akan mendapatkan lahan sendiri sebesar 80 persen lahan

budidaya PIR-nya setelah kredit selesai. Tujuan ini tak lain adalah agar para petani dapat mandiri dan tidak terus diurusi oleh perusahaan inti. Sebelumnya, para petani mendapat pembinaan dari perusahaan inti yang akan menunjang kemampuan budidaya dan manajerial perkebunannya.

Namun memang sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki tingkat resiko cukup tinggi karena masih berbasiskan sumber daya alam dan sangat tergantung pada alam. Oleh karena itu, resiko gagal panen sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, adanya asuransi pertanian sangat penting untuk menjamin resiko tersebut yang dapat merugikan petani kebun. Dalam telaah pustaka disebutkan bahwa kerugian yang akan ditanggung oleh pihak asuransi merupakan selisih antara hasil pertanian pada saat akan dipanen (inoogsting) dan harga hasil pertanian di satu pihak, dengan sesudah terjadinya kegagalan di lain pihak (Prakoso, 2004). Sehingga para petani kebun akan mendapatkan pendapatan sepadan dengan saat diasumsikan dalam keadaan normal pada saat panen. Hal ini akan membuat para petani tidak was-was dan tidak panik saat terjadi kegagalan panen sehingga para petani kebun akan fokus dalam membudidayakan kebunnya untuk mendapat hasil maksimal. Jika sudah diprediksikan akan mendapat hasil yang melimpah, maka apabila terjadi kegagalan panen, penggantian pihak asuransi akan semakin besar.

Integrasi asuransi ini lebih baik lagi diterapkan dalam pola PIR. Karena perkebunan rakyat mandiri memiliki peluang lebih besar untuk gagal panen atau hasil panen rendah sehingga pihak asuransi terlalu beresiko untuk menjadi penjaminnya. Selain itu, dalam telaah pustaka telah disebutkan bahwa dalam pola PIR terdapat fase prakonversi, dimana kredit ditanggung sementara oleh perusahaan inti dan fase konversi dimana kredit ditanggung oleh petani plasma. Hal ini membuat asuransi pertanian menjadi vital bagi petani plasma saat fase konversi karena pada fase ini pendapatan petani dapat dikatakan kecil karena akan terjadi pemotongan kredit dan juga cicilan untuk kredit yang sebelumnya ditangani oleh perusahaan inti. Apalagi dalam PIR karet, petani plasma

dibebankan pula dengan biaya pengolahan karet yang terdapat dalam identifikasi masalah. Hal-hal ini dapat memicu masalah lainnya, seperti kemiskinan petani, penjualan hasil panen kepada tengkulak karena menghindari pemotongan atau petani berhutang kepada tengkulak. Sehingga peranan asuransi pertanian adalah memberikan rasa aman kepada para petani plasma sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan juga perusahaan inti dapat bekerja lebih profesional lagi karena adanya pihak asuransi yang terlibat. Tentunya pihak asuransi tidak akan mau menjamin jika kualitas pembinaan dan pengadaan sarana produksi pertanian oleh perusahaan inti buruk.

## **4.2 Sintesis**

Adanya asuransi pertanian sangat penting bagi para petani, terutama petani yang tergabung dalam pola PIR karena dapat menjamin kegagalan panen saat petani sudah dibebani oleh pembayaran kredit yang tinggi.

Pihak asuransi hanya tinggal menjamin dari setiap hasil perkebunan dari komoditi yang diusahakan oleh petani plasma dengan premi dibayar dicicil setiap waktu panen yang berhasil. Dalam hal ini, terjadi pembagian resiko yaitu, resiko secara langsung jika gagal panen yang ditanggung asuransi pertanian dan resiko tidak langsung jika gagal panen yaitu meminimalisir terjadinya gagal panen seperti peningkatan kualitas pembinaan dan sarana produksi yang ditanggung oleh perusahaan inti. Ketiga pihak akan merasakan dampak positif. Pihak asuransi dapat mengembangkan bisnis asuransi di bidang perkebunan dengan baik dan prospeknya cerah. Pihak petani plasma akan merasa aman karena pembinaan dan penyediaan sarana produksi yang maksimal. Pihak perusahaan inti akan berkembang karena produktivitas petani meningkat dan sudah pasti akan dijual kepada pihak perusahaan inti karena pembinaan yang baik dan kedekatan yang intens dengan petugas lapang.

Permasalahan dalam identifikasi masalah pun akan teratasi. Masalah utama, yaitu kegagalan panen akan teratasi karena sudah ada pihak asuransi yang menanggung jaminannya. Masalah kurang optimalnya petugas lapangan (UPT) pun akan teratasi karena adanya resiko secara tidak langsung berupa meminimalisir kegagalan panen yang membuat perusahaan inti akan optimal dalam pembinaan dan pengadaan sarana produksi dan hasil panen akan dijual kepada pihak perusahaan inti. Permasalahan kedua dan ketiga diatasi sendiri oleh petani plasma karena pembinaan dan penyediaan sarana produksi yang baik akan meningkatkan produktivitas petani plasma sehingga pendapatan petani akan meningkat walaupun besarnya beban pemotongan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Adanya integrasi asuransi pertanian ke dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dapat memberikan solusi atas kegagalan penerapan asuransi pertanian di Indonesia karena adanya pembagian resiko antara pihak asuransi dengan perusahaan inti sehingga resiko tidak terlalu besar.

Dengan adanya integrasi asuransi pertanian ini pula ke dalam pola PIR dapat meningkatkan taraf hidupnya karena pembinaan dan penyediaan sarana produksi akan optimal dan produktivitas petani meningkat sehingga pendapatan petani bertambah dan meningkat taraf hidupnya.

### **4.2 Saran**

Sebuah konsep belum dapat dibuktikan jika belum terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan pemerintah, pihak perusahaan inti (perkebunan

besar), dan berbagai pihak terkait lainnya untuk menyukseskan pola PIR yang sudah dibentuk sejak tahun 1977 agar petani plasma dapat meningkat taraf hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Rofik. 1998. Perkebunan dari NES ke PIR. Jakarta: Puspa Swara.

Mubyarto, dkk. 1992. Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media.

Prakoso, Djoko. 2004. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsuddin dkk. 1985. Analisa Pembiayaan Proses Produksi pada Proyek PIR Perkebunan Teh: Studi Kasus pada Perkebunan Teh “Pagilaran”, Jawa Tengah. Di dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian Terpadu: Studi Kasus Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) Teh Perkebunan Teh “Pagilaran” di Jawa Tengah.

<http://www.bps.go.id/>

<http://www.pertaniansehat.or.id/>



### **BIODATA DOSEN PEMBIMBING**

Nama : Dra. Yusalina, MSi

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Menikah

Agama : Islam

Alamat : Blok A No.85 KPP IPB Alam Sinarsari, Cibereum,  
Darmaga, Bogor. 16680.

No. HP : 08121976563

Pekerjaan : Staf pengajar Departemen Agribisnis Fakultas  
Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

## **BIODATA KETUA KELOMPOK**

### **I. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Junasa Andhika Imanuddin  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Juni 1989  
Alamat Rumah : Jl. Swatirta no. 16 RT017/009 Kel. Kebon Bawang,  
Tanjung Priok. Jakarta Utara.14320.  
HP / Telpon Rumah : 081213558541  
E-mail : jun\_ageberz@yahoo.com

### **II. Latar Belakang Pendidikan**

#### **2.1 Pendidikan Formal**

Tahun 1995 – 2000 : Sekolah Dasar Negeri Kebon Bawang 05 Pagi  
Tahun 2000 – 2003 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 95 Jakarta  
Tahun 2003 – 2006 : Sekolah Menengah Atas Negeri 80 Jakarta  
Tahun 2007 – sekarang : S1 Agribisnis Institut Pertanian Bogor

### **III. Karya Ilmiah :**

#### **3.1 Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat :**

Penyusunan Makalah Lomba Karya Tulis Ilmiah Ekonomi Syariah Temu Ilmiah Nasional (TEMILNAS) VIII dengan judul "Konsep Pendidikan Ekonomi Islam Berbasis Sosioekonomi dan Pelestarian Lingkungan dengan Pendekatan Substantif di Indonesia untuk Pembentukan Citra Positif Islam di Masa Depan."

## **BIODATA ANGGOTA KELOMPOK 1**

### **I. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Hata Madia Kusumah  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 12 Agustus 1989  
Alamat Rumah : Balebak No.08 RT.04 RW.05 Balumbang Jaya  
Bogor Barat 16610  
HP / Telpon Rumah : 0857 1018 2455 / 0813 1088 0953  
E-mail : hatamadiakusumah@yahoo.com

### **II. Latar Belakang Pendidikan**

#### **2.1 Pendidikan Formal**

Tahun 1995 – 2001 : Sekolah Dasar Negeri Cariu 1  
Tahun 2001 – 2004 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Balaraja  
Tahun 2004 – 2007 : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Balaraja  
Tahun 2006 – sekarang : S1 Agribisnis Institut Pertanian Bogor

### **III. Karya Ilmiah :**

#### **3.1 Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat :**

Karya tulis ilmiah bertemakan "Krisis Global : Parameter Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Bangsa" pada lomba Economics View (E-View) yang diadakan tahun 2007 oleh Himpunan Profesi Mahasiswa Peminat Ilmu-ilmu Ekonomi Pembangunan (HIPOTESA) Institut Pertanian Bogor.

## **BIODATA ANGGOTA KELOMPOK 2**

### **I. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Atika Sisilia  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 11 Desember 1988  
Alamat Rumah : Jalan Poksay, Perumahan Villa Ciomas Indah  
Blok G8 No.14 RT.03/13 Ciomas – Bogor 16610  
HP / Telpon Rumah : 08567211898 / (0251)7520502  
E-mail : cretchzy\_girl@yahoo.com

### **II. Latar Belakang Pendidikan**

#### **2.1 Pendidikan Formal**

Tahun 1992 – 1993 : Taman Kanak – Kanak Merpati Pos Manado  
Tahun 1993 – 1996 : Sekolah Dasar Negeri Puspita Jaya Sakti Manado  
Tahun 1996 – 2000 : Sekolah Dasar Mardi Yuana III Bogor  
Tahun 2000 – 2003 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bogor  
Tahun 2003 – 2006 : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bogor  
Tahun 2006 – sekarang : S1 Agribisnis Institut Pertanian Bogor

#### **2.2 Pendidikan Informal**

Tahun 2003 – 2005 : Pendidikan Bahasa Inggris di LIA Bogor  
Tahun 2004 – 2005 : Kursus Musik Piano di Best Music Centre Bogor

### **III. Karya Ilmiah :**

#### **3.1 Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat :**

Karya tulis ilmiah bertemakan "Hutan dan Lingkungan" pada lomba yang diadakan tahun 2002 oleh Dharma Wanita Persatuan Departemen Kehutanan Jakarta bekerja sama dengan Pemerhati Lingkungan.

#### **3.2 Penghargaan Ilmiah yang Pernah Diraih :**

Meraih Juara Ke-II Lomba Karya Tulis tentang "Hutan dan Lingkungan" pada tahun 2002.

#### IV. Bentuk Partisipasi di Bidang Energi :

Keanggotaan dalam ENERGREEN Student Community, yakni organisasi mahasiswa peminat energi, komunitas bergerak dalam bidang pengembangan keprofesian di bidang energi.